

Prognosis Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara Disahkan dalam Perspektif Pertahanan Udara

Saudi Firmansyah Putra¹, Muhammad Zuhdzul², Taufik Hidayat³

^{1), 2), 3)}Program Studi Strategi Operasi Udara, Seskoau, Indonesia

saudi.firmansyah@gmail.com

Abstrak — Penelitian ini dilakukan berdasarkan perkembangan pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Isu tersebut terus bergulir, yang berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nomor 3 Tahun 2022 oleh DPR RI. Dengan berpindahnya ibu kota negara, Lanud Halim Perdanakusuma berubah statusnya di bidang pertahanan udara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menulis tentang Lanud Halim Perdanakusuma untuk menetapkan alternatif analisis berbasis data Lanud Halim Perdanakusuma dari perspektif Pertahanan Udara, terutama setelah Undang-Undang tersebut ditegakkan secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan prediktif. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan berbagai informan terkait dan dokumen pendukung lainnya. Menurut Miles, Salda, dan Huberman (2014), penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah ketika IKN telah sepenuhnya ditransfer ke Kalimantan, Jakarta akan berubah menjadi ibu kota ganda. Sebagai ibu kota bisnis perekonomian nasional, dan di sisi lain, Jakarta masih merupakan bekas ibu kota dengan sisa institusi pemerintahan yang tidak serta merta dipindahkan. Dengan demikian, Lanud Halim Perdanakusuma tetap dapat dioperasikan sebagai Lanud Protokol untuk mendukung IKN.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Pertahanan Udara.

Abstract — *This research was conducted based on the development of moving the capital city of Indonesia from DKI Jakarta to Penajam Paser Utara, East Kalimantan Province. The issue has been consistently rolling, which ended with ratifying the Law of National Capital (IKN) Number 3 of 2022 by the Indonesian House of Representatives. With the change of the national capital, Halim Perdanakusuma Air Base changed its status in air defense. Therefore, researchers are interested in writing about Halim Perdanakusuma Air Base to set an alternative data-based analysis of Halim Perdanakusuma Air Base from the perspective of Air Defense, especially after the Law has been legally enforced. This study uses a qualitative method with a predictive approach. Researchers collected data from interviews with various related informants and other supporting documents. According to Miles, Salda, and Huberman (2014), this study uses data analysis techniques carried out interactively through data reduction, data display, and verification. The results of this study are that when the IKN has completely transferred to Kalimantan, Jakarta will be transformed into a dual capital city. As the business capital of the national economy, and on the other hand, Jakarta is still the former capital city with remaining governmental institutions that do not necessarily be transferred. Thus, Halim Perdanakusuma Air Base could still be operated as the Protocol Air Base to support IKN.*

Keywords: Air Defense, Halim Perdanakusuma Air Base, National Capital.

1. PENDAHULUAN

"Kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern", ungkapan pidato yang fenomenal Presiden Pertama Republik Indonesia pada HUT AURI tahun 1955 dimana pemikiran beliau telah mengedepankan aspek kekuatan udara pada masa itu.

Sejarah membuktikan dalam berbagai perang seperti Yom Kipur tahun 1973, Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, serangan NATO ke Libya tahun 2011 dan yang terbaru ini ialah serangan Rusia ke Ukraina tahun 2022 yang didominasi oleh kekuatan udara. Pernyataan tersebut didukung oleh Colin S. Gray (2012) yang menyatakan jika sebuah negara ingin mencapai tujuan politiknya maka negara tersebut harus memiliki kekuatan udara dan kontrol penuh terhadap udara.

Kontrol terhadap udara atau pengendalian udara yang dimaksud ialah serangan udara, mobilitas udara, intelijen, pengawasan dan pengintaian, komando dan kendali dan pemeliharaan kekuatan terus menjadi instrumen utama dalam sebuah sistem pertahanan udara sepanjang 100 tahun terakhir ini. Kekuatan udara selalu dipandang sebagai senjata ofensif yang sangat ampuh dan kuat karena dapat menyerang sangat cepat dengan taktik penyerangan tanpa diketahui oleh pihak musuh sesuai dengan keunggulan karakteristik kekuatan udara diantaranya yaitu kecepatan, daya jangkau, fleksibilitas, daya penghancur, presisi dan daya kejut (Perkasau, 2019).

Superioritas akan penguasaan udara akan terbebas dari serangan udara pihak musuh atau sebaliknya, akan dengan bebas menyerang musuh dalam waktu singkat (Meilinger, 2018). Jika menilik pada sistem pertahanan udara Indonesia saat ini, dalam hal ini sebagai komponen utamanya ialah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) bertanggung jawab untuk melindungi ruang udara seluas 7,539,693 km².

Sehingga guna mencapai tujuan sebuah negara yang berdaulat penuh atas ruang udara, Indonesia menetapkan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yakni zona identifikasi pesawat udara asing sebelum memasuki wilayah udara.

Minimnya infrastruktur pertahanan udara seperti jangkauan radar yang rendah yang belum mampu mencapai titik vital seluruh ruang udara Indonesia, maka ADIZ dapat memaksimalkan perlindungan dan pengamanan seluruh wilayah udara Indonesia dari masuknya pesawat udara asing yang tidak memiliki izin melintas (Razqi, 2021). Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas TNI Angkatan Udara ialah menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang sudah di ratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Seiring meningkatnya penerbangan di bandara Halim Perdanakusuma, maka meningkat pula aktivitas penerbangan yang menambah kebisingan lalu lintas udara di wilayah ibu kota negara khususnya di wilayah kecamatan Makassar (Fadillah, 2016). Jika dibandingkan dengan penggunaan *civil enclave* di Lanud Yokota (Yokota Air Base) yang berada di ibu kota Tokyo, menurut Pemerintah Metropolitan Tokyo (2017) kebisingan lalu lintas penerbangan di Lanud dapat dikontrol dengan memperkenalkan model pesawat yang menghasilkan kebisingan lebih rendah, mengadopsi metode operasional penerbangan yang mengurangi kebisingan dan mempertimbangkan slot waktu tertentu.

Penggunaan Pangkalan Udara Yokota oleh pesawat sipil akan melengkapi fungsi bandara di wilayah ibu kota negara melalui

peningkatan kapasitas bandara dimana permintaan penerbangan bisnis sangat tinggi sehingga otoritas Lanud Yokota terpaksa memenuhi kapasitas dan infrastruktur pendukung bandara demi keamanan dan ketertiban ibu kota. Selain itu akan ada penambahan kekuatan lainnya seperti Lanud tipe A, Skadron Udara Tempur, Skadron Udara Angkut, Skadron Teknik, Skadron Pengamanan Ibu Kota, Resimen Pertahanan Udara, Detasemen Pertahanan Udara hingga Rumah Sakit dan rumah dinas yang akan disiapkan (Septianto, 2019).

Rencana pemindahan ibu kota negara di Penajam Paser Utara memakan biaya dan waktu yang cukup besar. Bahkan di era awal kemerdekaan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), Ibu Kota negara Indonesia sempat beberapa kali berpindah mengikuti dan menyelamatkan tokoh utama politik agar terhindar dari agresi militer Belanda yakni Yogyakarta, Bukit Tinggi (Sumbar), Bireun (Aceh) dan kembali lagi ke Jakarta (Setyaningrum, 2022). Di Era Presiden Soeharto rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Jonggol kabupaten Bogor namun juga bernasib sama dengan era sebelumnya.

Barulah di era Presiden Joko Widodo bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu kota Negara pada 18 Januari 2022 ke Kalimantan Timur di wilayah Penajam Paser Utara (Ramadhoni, 2019).

Penggunaan konsep perencanaan lingkungan dan gagasan masyarakat yang peduli membantu mempromosikan integrasi dan solidaritas komunitas dalam komunitas multi-etnis Malaysia. Sebanyak 67.000 rumah tapak, apartemen, dan kondominium dibangun, dengan 3,8 juta meter persegi Pemerintahan dan 3,4 juta meter persegi penggunaan lahan komersial di delapan (8) kawasan memberikan perjalanan yang lebih singkat untuk bekerja karena tempat kerja dan rumah terletak di dalam wilayah sekitarnya.

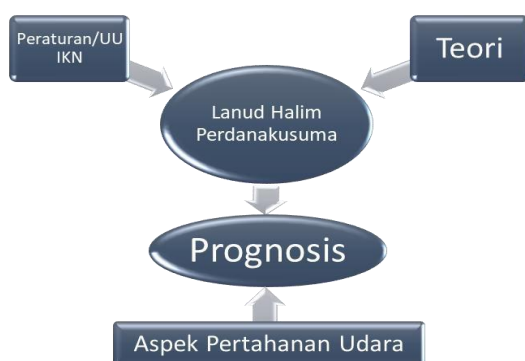
Hal ini juga merupakan kota dengan identitas dan karakter yang jelas yang berakar pada budaya dan tradisi lokal yang dibuktikan dengan arsitektur dan desain lokalnya. Ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan pemerintah Indonesia mengacu pada keberhasilan dan/atau kegagalan yang dialami Brasil, Malaysia, dan Tanzania, yaitu kemauan politik pemerintah yang kuat. Perpindahan ibu kota negara Indonesia pun tidak bisa dielakkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah status keberadaan Lanud Halim Perdanakusuma ini setelah Undang-Undang tentang IKN ini diberlakukan, apakah akan pindah mengikuti IKN yang baru beserta alutsista dan pengawaknya atau kah akan dibangun Lanud baru beserta alutsista yang baru pula, atau ada alternatif-alternatif lain yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dihadapkan dengan kondisi saat ini dalam perspektif pertahanan udara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti telah menganalisis 7 (tujuh) penelitian terdahulu yang berkaitan, sejenis dalam bentuk metode dan kesamaan dalam tema penelitiannya yaitu penelitian mengenai pemindahan ibu kota oleh Supriyatno (2013) dan Romero (2020), penelitian mengenai penggunaan pangkalan udara oleh Romilham (2020) dan Harmon *et al.* (2014), serta penelitian mengenai *prognosis* oleh Steyerberg *et al.* (2013), Moons *et al.* (2009) dan Benford & Snow (2000). Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk merelokasi fungsi pemerintahan dan pegawai pemerintah serta membangun infrastruktur baru sebagai simbol nasional yang sebelumnya perlu dikaji lebih dalam salah satunya menggunakan teknologi sistem informasi geografis (SIG) karena geografi pertahanan memiliki pengaruh yang besar.

Perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai *prognosis* tentang status Lanud Halim Perdanakusuma setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan dan secara otomatis pusat pemerintahan berpindah ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang tentunya akan berimbas pada Lanud Halim Perdanakusuma. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan mendapat ramalan atau perkiraan yang menggambarkan bagaimana keadaan Lanud Halim Perdanakusuma setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Kerangka berpikir ini akan peneliti gambarkan dalam bentuk Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Mengingat hanya Lanud Halim Perdanakusuma di Indonesia yang memiliki area cukup luas, berada di wilayah perkotaan padat penduduk dan memiliki sumber daya hayati yang vital. Besarnya potensi wilayah di area Halim Perdanakusuma serta banyak instalasi militer strategis, peneliti ingin melakukan penelitian terkait “*Prognosis Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara Disahkan dalam Perspektif Pertahanan Udara*”. Peneliti mencoba menganalisis permasalahan tersebut dengan beberapa konsep yakni:

a. Konsep Pertahanan Negara

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan mempengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern.

b. Konsep *Strategic Air Power*

Kekuatan udara diperkenalkan H.G. Wells tahun 1908 melalui “*The War in the Air*” dan istilah tersebut meluas digunakan tahun 1920-an, khususnya saat kekuatan ini menjadi terminologi umum dan kapabilitas satuan udara. Ada 8 elemen yang memiliki peran cukup penting guna mengoptimalkan kekuatan udara yaitu sistem udara, *command* dan *control*, dan kemampuan untuk pemanfaatan spektrum elektronik, industri pertahanan, pangkalan udara, pengembangan personel dan pelatihan,

strategi dan perencanaan, dan intelijen (Westenhoff, 1990).

c. Konsep *Prognosis*

Sebuah model *prognosis* merupakan kombinasi formal oleh dari berbagai ramalan dengan risiko yang spesifik dengan tujuan akhir yang dapat dihitung terhadap seorang pasien. Nama lain untuk model *prognosis* ialah indeks atau aturan *prognosis* (dan prediktif), model prediksi risiko (atau klinis), dan

model prediktif. Untuk individu dengan kondisi kesehatan tertentu (titik awal), model *prognosis* mengubah kombinasi nilai prediktif menjadi perkiraan risiko yang mengalami titik akhir tertentu dalam periode tertentu. Idealnya ini menghasilkan perkiraan risiko absolut (probabilitas absolut) untuk mengalami titik akhir, tetapi mungkin memberikan risiko relatif atau skor risiko (Steyerberg *et al.*, 2013).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dimana analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna yang diakhiri dengan laporan tertulis yang fleksibel (Creswell, 2014). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan prediktif yang dilakukan melalui penelitian yang bersifat korelasional dan kecenderungan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan

wawancara terhadap informan dalam hal ini Asrena Kasau, Asops Kasau, Aspers Kasau, PT Angkasa Pura II, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri serta informan lain yang kompeten. Kemudian data sekunder untuk mendukung dan melengkapi data primer diperoleh melalui studi pustaka berupa laporan-laporan terkait Lanud Halim Perdanakusuma, dokumen-dokumen, dokumentasi, dan bukti-bukti tertulis lainnya baik dari informan maupun diperoleh dari media cetak ataupun elektronik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertahanan Udara Lanud Halim Perdanakusuma

Dalam kacamata pertahanan udara, kewaspadaan akan potensi ancaman eksternal kemungkinan besar terjadi datang dari negara tetangga atau dari arena perang dunia saat ini (perairan Laut Natuna Utara). Penajam Paser Utara atau IKN memiliki jarak yang cukup dekat dengan perbatasan darat dengan Malaysia yakni 2.062 Km. Selain itu, IKN juga berada jalur lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia II (di antara selat Makassar dan menjadi salah satu *Choke Point* dunia). Aspek pertahanan udara yang cukup

menonjol adalah keberadaan IKN cukup mendekati *Flight Information Region* (FIR) Negara Tetangga (Singapura FIR, Kinabalu FIR, Manila FIR). Lebih lanjut, wilayah Kalimantan Timur secara umum juga berada pada wilayah *Transnational Crime* salah satunya ialah *Terrorist Transit Triangle* di perairan laut Sulu. Terakhir IKN juga rawan akan Konflik Horizontal seperti yang pernah terjadi antara suku Dayak dan Madura.

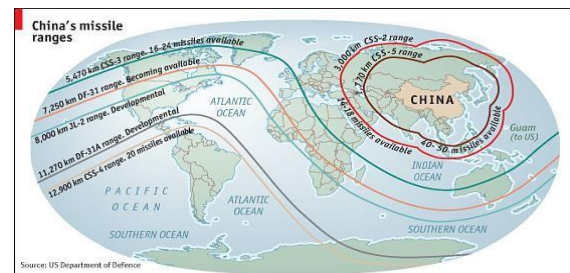
Saat ini IKN Penajam Paser Utara belum dilengkapi dengan sejumlah infrastruktur pertahanan guna menghadapi berbagai potensi ancaman konflik global saat ini.

Salah satu alutsista yang seharusnya dimiliki di wilayah IKN ialah *guided missile* (peluru kendali) yang mampu menangkal setiap serangan udara. Sejak tahun 2020 Indonesia telah memiliki sistem pertahanan udara yang dikenal canggih dan dimiliki oleh TNI AU yakni NASAMS (*Norwegian/ National Advanced Surface to Air Missile System*) buatan *Kongsberg Defence & Aerospace* (KDA) dari Norwegia dan *Raytheon*, perusahaan asal Amerika Serikat. Namun sayangnya, NASAMS ini baru ditempatkan di wilayah Tangerang Banten guna melindungi langit DKI Jakarta dari ancaman serangan udara (wawancara, Yono Reksoprodjo, 2022).

Untuk menghadapi dinamika ancaman regional dan global yang sangat cepat berubah, TNI AU membutuhkan teknologi yang memiliki dampak daya gentar seperti dimiliki oleh SAM 75, sehingga pilihan tersebut jatuh pada teknologi NASAMS sebagai pengganti SAM 75. Pada dasarnya NASAMS merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi yang menggunakan rudal (peluru kendali) sebagai alat penghancur sasaran di udara yang didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Setelah melakukan kerja sama pembelian NASAMS di tahun 2017 dan penggunaan di tahun 2020, untuk Indonesia, NASAMS ditempatkan di Teluk Naga, Tangerang di bawah kendali TNI AU untuk melindungi Jakarta sebagai ibu kota negara.

Strategi dalam memilih menggunakan NASAMS untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia salah satu alasannya adalah tidak lepas dari terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk saat ini Indonesia secara total hanya memiliki 41 pesawat tempur, dan hanya 1 Skadron yang siap tempur, sehingga kondisinya jauh dari ideal, sehingga keberadaan NASAMS dapat menutupi kekurangan itu untuk sementara waktu. Saat ini, dalam hal kepemilikan NASAMS, Indonesia menjadi negara pertama di kawasan yang memiliki sistem pertahanan ini. Sebelumnya

yang sudah memiliki NASAMS adalah Finlandia, Belanda, AS, Spanyol dan Oman (wawancara, Yono Reksoprodjo, 2022).



Gambar 2. Radius Jangkauan Peluru Kendali (Rudal) Negara China
(Sumber: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, 2020)

Dari Gambar 2 bisa dilihat bahwa China sebagai salah satu negara yang mempengaruhi politik global memiliki rudal dengan jangkauan jelajahnya melampaui negara Indonesia. Ada sekitar 40-50 rudal yang tersedia dan *standby* 24 jam siap diluncurkan jika konflik Laut Natuna Utara mengarah kepada perang terbuka misil. Ironisnya, jika perang tersebut terjadi dan pemerintah Indonesia sudah berkantor di IKN Penajam Paser Utara tapi tidak dilengkapi dengan alutsista penangkis serangan udara. Maka letak strategis ibu kota negara harus benar-benar dikaji ulang.

Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto menilai secara geografis bahwa IKN memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas *anti-access/ area-denial* di sekitar IKN perlu diperkuat. Kendati kerentanan udara tinggi, bukan berarti kekuatan matra laut dan matra darat dikesampingkan begitu saja. Menurut Andi, tantangan ke depan adalah segera membentuk doktrin pertahanan IKN secara terintegrasi. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita membentuk segera doktrin pertahanan ibu kota, menggelar kekuatan darat, kekuatan laut, pada saat nanti peran utamanya bersifat *airsentrik* (Maulana, 2022). Risiko yang harus dipersiapkan ialah TNI harus mampu memitigasi peta teater perang di

LNU serta merespons membangun kekuatan militer di wilayah Kalimantan.

Selain terjadinya *arms race* antara Indonesia dan negara tetangga. Hal lain yang patut menjadi pertimbangan adalah keberadaan beberapa aliansi pertahanan yang ada di wilayah sekitar Indonesia yang terbentuk sejak pasca Perang Dunia II ataupun yang baru terbentuk yang diakibatkan sebagai respons terhadap menguatnya kekuatan China. Aliansi tersebut meliputi aliansi ANZUS (Australia-New Zealand-United State), *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura, dan juga aliansi Australia, United Kingdom, dan United State yang disingkat AUKUS. (Putri Nindya *et al.*, 2022).

Menurut Paban VI/Jianstra Sopsau, Kolonel Nav Insan memperkirakan setelah IKN pindah ke Kalimantan, Lanud Halim tetap dipertahankan seperti saat ini dengan pembatasan penggunaan untuk menjadi bandara sipil. Sehingga Lanud Halim tetap berfungsi menjadi Lanud militer, bukan bandara sipil. Akan tetapi jika dibutuhkan dapat digunakan sebagai bandara sipil seperti saat ini. Atas kondisi ini, pada dasarnya tidak ada pengurangan fasilitas Lanud Halim Perdanakusuma dengan kepindahan IKN. Sebab sebenarnya IKN bukan pindah, tapi malah bertambah, di Jakarta dan Kalimantan. Lanud Halim tetap ramai, bahkan mungkin intensitas penerbangannya meningkat, karena mobilitas pejabat negara dari Lanud IKN ke Jakarta tentunya menambah beban Lanud Halim. Untuk saat ini Lanud IKN baru tidak tersedia, sebab IKN baru belum selesai dibangun, sehingga tidak ada pergerakan ke wilayah IKN baru, dan adanya ke tempat lain. Jika ada IKN yang baru, bisa saja di hari Sabtu dan Minggu pekerja dan VIP dari IKN baru akan pulang ke Jakarta.

Pasca implementasi UU IKN, maka IKN yang ada di Penajam Paser Utara akan menjadi pusat pemerintahan dan Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan perekonomian nasional, sehingga posisi Lanud Halim Perdanakusuma

akan sangat strategis karena menjadi bandara yang ada di tengah kota Jakarta. Sebelumnya, Lanud Halim Perdanakusuma pada dasarnya tidak melayani penerbangan komersial. Namun pemerintah memutuskan Lanud Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial. Hal ini juga dikemukakan oleh Paban I/Renstra Srenaau Kolonel Pnb Dedy, bahwasanya yang perlu diwaspadai dari kebijakan ini adalah bahwa jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam proses kerja sama tersebut. Mengingat Lanud Halim Perdanakusuma merupakan Lanud utama dalam sistem Pertahanan Negara. Dimana Lanud tersebut terdapat Skadron-Skadron pesawat militer, sehingga dengan dijadikannya Lanud Halim sebagai *enclave civil*, diharapkan penerbangan sipil jangan sampai mengganggu latihan militer.

Keberadaan beberapa aliansi pertahanan yang ada di sekitar Indonesia ini menciptakan pola baru dalam upaya Indonesia memperkuat sistem pertahanan. Selama ini, dalam menanggapi *arms race* dan menguatnya konsolidasi dalam bentuk kerja sama aliansi pertahanan, Indonesia melakukan pendekatan di bidang pertahanan dengan cara memperkuat Alutsista. Tentunya selain memperkuat kerja sama di bidang diplomasi pertahanan antara tiap negara yang berpotensi terlibat konfrontasi dengan Indonesia, maupun negara yang selama ini menjalin persahabatan dengan Indonesia.

Dalam hal kerja sama paling baru yaitu AUKUS, pakta ini berkomitmen agar Australia mendapatkan bantuan dari AS dan Inggris untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, yang menjadikan Australia sebagai negara ketujuh di dunia yang mengoperasikan kapal selam nuklir, yang tentunya semakin memperkuat rivalitas antara Amerika Serikat dan China di wilayah Asia Tenggara dimana posisi Indonesia berada di *center of gravity* Asia Tenggara. Bagi Indonesia yang menganut politik bebas aktif, kehadiran pakta AUKUS memberikan dampak

tantangan yang amat besar bagi Indonesia sebab berpotensi menjadikan posisi Indonesia yang berada di tengah rivalitas aliansi AUKUS dan Cina menjadi medan pertempuran kedua kekuatan tersebut.

Dalam kondisi ini, dalam keadaan apa pun, walaupun Indonesia tidak tergabung dalam pakta pertahanan apa pun namun jika eskalasi konflik antara dua kekuatan ini mengemuka, Indonesia tetap akan terlibat. Hal ini terjadi karena wilayah laut dan utamanya wilayah udara Indonesia akan menjadi teater tempur kedua belah pihak. Untuk menghadapi skenario ini, Indonesia harus melakukan pertahanan diri, menggelar kekuatan serta mengoperasikan kekuatan tempur utamanya adalah TNI AU yang harus menyiagakan secara penuh basis kekuatan udara dan pangkalan udara.

Jika konflik dua kekuatan besar ini menguat, Pangkalan Udara yang akan terlibat dalam mengamankan kedaulatan Indonesia adalah Lanud Halim Perdanakusuma-Jakarta, Lanud Roesmin Nurjadin-Pekanbaru, Lanud Sultan Hasanuddin-Makassar, Lanud Syamsudin Noor-Banjarmasin, Lanud Supadio-Pontianak, Lanud Sri Mulyono Herlambang-Palembang, yang ke semua Lanud tersebut tentunya akan berada di bawah Kodal Satgas Udara di Lanud Halim, karena di sana terdapat Makoopsudnas dan Makoopsud-I. Konsekuensi dari hal ini, Lanud Halim akan menjadi tumpuan gelar kekuatan udara untuk kepentingan pertahanan nasional Indonesia.

Prognosis Lanud Halim Perdanakusuma

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara nomor 59 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma disingkat Lanud Halim adalah satuan pelaksana Koopsau I (yang saat ini menjadi Koopsud I Koopsudnas) yang berkedudukan langsung di bawah Pangkoopsau I (Pangkoopsud I Koopsudnas) yang memiliki

tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya, pemberdayaan wilayah pertahanan udara, dan menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya. Sesuai dengan fungsinya untuk menyelenggarakan pembinaan dan menyiapkan satuan dalam jajarannya, dimana Skadron Udara 17 dan Skadron Udara 45 yang merupakan Skadron Udara untuk mendukung kegiatan penerbangan VIP/VVIP kenegaraan berada di bawah jajaran Lanud Halim.

Proyeksi dan kalkulasi atas meningkatnya dinamika ancaman di kawasan dewasa ini membuat Indonesia menjadi lebih terjepit, sehingga mengharuskan Indonesia mengoptimalkan fasilitas utama seperti Lanud Halim yang fungsinya bisa dikembalikan secara optimal sebagai Lanud militer setelah IKN dipindahkan ke Kalimantan. Mengenai pentingnya mengembalikan fungsi Lanud Halim sebagai infrastruktur militer, jika dilihat dari sisi sejarah, setidaknya ada dua peristiwa besar dalam lingkup nasional dan internasional yang dapat menggambarkan tentang nilai strategis dari keberadaan Lanud Halim Perdanakusuma dari sisi fungsi militer. Pertama adalah, pada saat terjadinya pembajakan pesawat terbang Garuda Indonesia jenis DC-9 rute Jakarta-Medan pada tanggal 28 Maret 1981. Peristiwa besar kedua ialah peristiwa Gempa Bumi dan Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, saat itu pusat krisis penanggulangan bencana nasional digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Dari segi struktur, Lanud Halim Perdanakusuma sebagai *military airbase* merupakan sub sistem dari alat utama sistem senjata (alutsista). Kegiatan yang dilakukan di Lanud Halim tidaklah semata-mata latihan penerbangan yang hanya melibatkan pesawat terbang. Latihan juga melibatkan personel dari Pasukan Lintas Udara (Linud) dan perbekalan TNI Angkatan Darat serta Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) TNI Angkatan Udara dengan jadwal latihan tertentu, antara

lain penerjunan dan latihan pengamanan obyek vital nasional, serta penerbangan bantuan administrasi dan logistik sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kondisi vital, yang tentunya dapat terganggu dengan adanya penerbangan komersial yang kini menumpang di Lanud Halim.

Guna mendukung operasi militer TNI, Lanud Halim Perdanakusuma menjadi pangkalan tolak bagi pasukan-pasukan tempur dari semua Angkatan maupun Pasukan Pengamanan dari Polri, adanya Skadron Udara 31 Angkut Berat dengan pesawat C-130 Herkules dan Skadron Udara 2 angkut ringan berfungsi sebagai pengangkut pasukan maupun logistik ketika terjadi bencana alam. Hal ini menyebabkan Komandan Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma berfungsi sebagai Komandan Satgas Udara Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Selain itu, Lanud Halim juga diberikan tugas pembinaan di bidang olahraga kedirgantaraan, selaku Ketua Federasi Aero Sport Indonesia Daerah (Fasida) DKI Jakarta (Puspen TNI, 2015).

Jika dilihat upaya pemerintah saat ini dalam menangani pembangunan di sekitar Lanud Halim, terlihat jika upaya untuk mengembalikan fungsi Lanud Halim menjadi seutuhnya sebagai Lanud militer menjadi sulit terlaksana dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk menciptakan integrasi sarana transportasi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dengan melakukan integrasi antara sistem transportasi darat berbasis Kereta Api Cepat dengan sistem transportasi udara yang ada di Lanud Halim. Konsekuensi dari hal ini mengindikasikan bahwa dengan integrasi ini, pemerintah berencana untuk tetap menjadikan Lanud Halim sebagai *civil enclave* pasca pemindahan IKN ke Kalimantan. Sehingga hal ini juga menunjukkan jika walaupun dinamika ancaman meningkat di kawasan, dalam bentuk terjadinya *arms race* dan perlombaan senjata nuklir, pemerintah tetap melihat fungsi Lanud Halim sebagai Lanud yang mengakomodasi penerbangan sipil jauh lebih penting dibanding

sebagai sentra komando kendali untuk mempersiapkan upaya menghadapi eskalasi ancaman di kawasan.

Dalam perspektif *Center of Gravity* (COG) karena perubahan ibu kota pertahanan, Kolonel Nav Insan menyatakan hal ini akan berdampak pada COG yang bertambah, dan bukan berpindah. Dalam pengesahan IKN baru, yang berpindah hanya pemerintahan, sedangkan Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian. Jika Jakarta sebagai pusat perekonomian diserang, maka perekonomian tentunya akan lumpuh. Jadi secara *prognosis*, keberadaan pemindahan IKN akan menambah COG-nya. Sebab sebelumnya IKN hanya satu, dan kini dua, satu pusat ekonomi dan satu lagi pusat pemerintahan. Di IKN baru, dalam satu kawasan tersebut ada Bandara Sepinggan, dan Lanud IKN ada di dalam area IKN. Ke depan direncanakan akan ada pertahanan udara yang melingkari IKN. Sebab mempertimbangkan ancaman dari utara dan posisi IKN yang sangat dekat sekali dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang tentunya akan menjadi ancaman nyata. Sama seperti Jakarta, walaupun lalu lintas lebih banyak melewati ALKI I dibanding ALKI II, sehingga pertahanan udaranya harus bertambah, seperti pertahanan udara berbasis rudal dan pesawat tempur. Oleh karena itu di Lanud IKN baru yang direncanakan tersebut sudah dipersiapkan *shelter* untuk berbagai jenis pesawat tempur dan alutsista lainnya.

Selain itu, Lanud Halim Perdanakusuma sudah melakukan latihan-latihan militer baik yang bersifat perang maupun selain perang guna menjaga langit ibu kota Jakarta. Lanud Halim juga menjadi pangkalan aju untuk mendistribusikan logistik ke daerah-daerah terjadinya bencana di penjuru Indonesia. Salah satu latihan terkini dilakukan ialah Latihan Perkasa "A" tahun 2022 ini melibatkan beberapa unsur Skadron Udara, seperti Skadud 3, Skadud 1, Skadud 5 dan Skadud 51. Unsur Satrad sebagai sensor melibatkan seluruh satuan radar di jajaran Kosek IKN, MCC Soetta dan Pontianak.

Dalam kegiatan Latihan Perkasa "A" tahun 2022 melibatkan beberapa Unsur dari Denhanud 471 Kopasgat, Yon Arhanud 14/PWY, KRI Sultan Hasanudin 366 dan PT. Pertamina EP Zona 7 sebagai obyek vital. "Latihan Perkasa "A" merupakan latihan Hanud yang diselenggarakan oleh Koopsudnas di wilayah tanggung jawab Kosek IKN dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional unsur-unsur Hanud TNI sesuai dengan sistem Pertahanan Udara Nasional serta menguji satuan jajaran Kosek IKN dan satuan Hanud kewilayahan di bagian barat NKRI meliputi unsur radar, tempur sergap, penindak *Low Speed Low Altitude*, Lanud, KRI, Hanud Titik, dan Hanud Pasif (Kosekhanudnas_I, 2022).

Disisi lain, pelaksanaan operasi dan latihan Lanud Halim Perdanakusuma dalam mewujudkan profesionalisme awak pesawat dilakukan dengan baik meskipun masih mengalami kendala, diantaranya pengaturan waktu, belum terbangunnya sinergi dan kerja sama yang baik, terbatasnya sarana dan prasarana, belum adanya *grand design* terukur dalam pelaksanaan operasi dan latihan dan sebagainya. Kondisi ini jelas mengganggu kesiapan Lanud dalam mewujudkan profesionalisme awak pesawat. Padahal kesiapan awak pesawat menjadi salah satu faktor menentukan atas baiknya pelaksanaan tugas khususnya dalam mengoptimalkan Lanud Halim Perdanakusuma baik untuk kepentingan militer maupun penerbangan komersial (Ridwan & D.A.R, 2022).

Keputusan pemerintah yang membuka Lanud Halim sejak tahun 2014 menjadi bandara komersial menjadikan aspek keamanan Lanud Halim menjadi berkurang, sebab kapasitas Lanud Halim yang memiliki satu *runway* harus dibagi dengan pihak komersial, dan juga harus dibagi dengan pesawat dari tamu VVIP pemerintah. Konsekuensi dari hal ini adalah membuat pengamanan di Lanud Halim menjadi terbuka. Jika sebelumnya Lanud Halim adalah ring satu dari pengamanan intelijen udara dan pengamanan internal Lanud Halim, maka untuk saat ini hal itu tidak

lagi mutlak, karena pengamanannya juga melibatkan pihak swasta dan BUMN yang terlibat dalam penanganan Halim.

Konsekuensi *enclave* sipil ini adalah bahwa Lanud Halim menjadi Lanud yang semi terbuka, sehingga menyulitkan dalam hal pemaksimalan intelijen udara dalam mengamankan Lanud Halim dan ranah udara Indonesia. Terlebih lagi untuk saat ini perkembangan ICBM yang ada di beberapa negara yang sedang melakukan *arms race* seperti Cina, Korea Utara, dan Amerika Serikat yang kemungkinan menjadikan Laut Natuna Utara sebagai teater perang baru sehingga membuat intelijen udara harus bekerja maksimal untuk mengamankan ranah udara Indonesia. Akan tetapi dengan dijadikannya Halim sebagai bandara komersial, maka menyebabkan kemampuan untuk memaksimalkan intelijen udara menjadi terbatas karena lalu lintas pesawat Angkatan Udara menjadi terbatas, dan lalu lintas pesawat komersial di Lanud Halim semakin memudahkan pihak lain untuk memantau kemampuan Halim dalam melakukan pergerakan, penyerangan dan penangkalan (Ramelan, 2015).

Dalam hal perencanaan strategi kekuatan udara, taktik pertahanan vertikal atau pertahanan udara di Pangkalan TNI AU di wilayah Jakarta sebagai ibu kota negara dilaksanakan oleh Koopsudnas (Komando Operasi Udara Nasional) dalam hal ini oleh Kosek (Komando Sektor) I yang berpusat di Lanud Halim Perdanakusuma yang juga membawahi Bandara Halim Perdanakusuma. Untuk memperkuat mekanisme pertahanan udara di wilayah ibu kota negara ini dibangun sinergitas baik tidak hanya dari pihak Pangkalan TNI AU tetapi juga Bandara Halim Perdanakusuma dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada sehingga mampu membangun pertahanan pangkalan yang diharapkan guna mengamankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Taktik lainnya ialah memberlakukan ADIZ sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengamanan

wilayah udara untuk mengidentifikasi setiap penerbangan yang melewati area terlarang.



Gambar 3. ADIZ Pulau Jawa
(Sumber: Indoavis Nusantara, 2010)

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa ADIZ hanya melindungi area selat Sunda, pulau Jawa hingga pulau Lombok. Dalam Kebijakan

5. KESIMPULAN

Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma akan tetap berfungsi sebagai landasan udara utama TNI AU tipe A yang berada di pulau Jawa setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam aspek pertahanan udara, Lanud Halim Perdanakusuma tetap menjadi ujung tombak utama pertahanan udara di wilayah Jakarta yang diemban oleh Komando Sektor IKN yang saat ini masih bermarkas di Lanud Halim Perdanakusuma. Meskipun nantinya IKN baru di Penajam Paser Utara yang rencananya akan dibangun Lanud yang memiliki sistem pertahanan yang lebih modern namun saat ini masih memberdayakan Lanud Dhombek untuk mendukung fungsi keprotokoleran pejabat maupun tamu negara selama di IKN. Fungsi Lanud Halim Perdanakusuma tetap menjadi pangkalan tolak bagi pasukan-pasukan tempur dari semua Matra maupun Pasukan Pengamanan dari Polri, adanya Skadron Udara 31 Angkut Berat dengan pesawat C-130 Herkules dan Skadron Udara 2 Angkut Ringan berfungsi sebagai pengangkut pasukan maupun logistik ketika akan melakukan

Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, sebagai rujukan utama di bidang pertahanan, disebutkan bahwa pembangunan wilayah pertahanan pada matra udara dilaksanakan dalam rangka melindungi wilayah udara nasional termasuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara (*Air Defence Identification Zone*) beserta alat utama sistem persenjataan matra udara. Darisegi pertahanan matra udara, pulau Jawa dilengkapi Skadron Udara Intai, pesawat tempur, rudal jelajah berbasis udara dan pesawat angkut/*tanker*, dan helikopter tempur. Infrastruktur tersebut digelar untuk menghadapi ancaman utama terhadap ibu kota negara. Meskipun untuk kasus Jakarta tercatat belum pernah mengalami serangan setingkat perang sejak Perang Kemerdekaan hingga sekarang.

tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam aspek pertahanan udara, Pasca pengesahan UU IKN, Halim akan tetap menjadi pusat komando krisis nasional dalam rangka melaksanakan tugas OMSP diantaranya yaitu penanggulangan bencana. Seluruh pesawat terbang yang dimiliki TNI Angkatan Udara dan pesawat dari negara tetangga yang dikerahkan dan keseluruhannya digerakkan dari pusat kendali operasi bencana nasional di Halim Perdanakusuma. Jakarta sebagai kota pusat bisnis nasional tentunya mampu menyediakan barang-barang tanggap darurat atau barang bantuan secara cepat untuk disalurkan ke daerah-daerah yang tertimpa musibah.

Selain itu, pasca implementasi UU IKN, status Lanud Halim Perdanakusuma masih tetap difungsikan sebagai *civil enclave* yang diprediksi akan adanya peningkatan intensitas penerbangan sipil di Lanud Halim Perdanakusuma dikarenakan Jakarta akan memiliki fungsi menjadi *dual capital city*

yaitu di satu sisi akan dinobatkan sebagai pusat kota bisnis perekonomian nasional, di sisi lain sebagai kota bekas ibu kota negara (*old capital city*) dimana masih adanya perkantoran lembaga pemerintahan yang tidak ikut direlokasi sehingga fungsi Lanud keprotokolan masih tetap dijalankan oleh Lanud Halim Perdanakusuma. Namun, dengan adanya peningkatan frekuensi penerbangan sipil di Lanud Halim Perdanakusuma dapat mengganggu profesionalitas latihan para penerbang TNI AU dikarenakan Halim Perdanakusuma hanya memiliki satu sisi landasan tunggal.

Kedepannya wilayah Halim Perdanakusuma diperkirakan akan menjadi *hub* transportasi terintegrasi terbaik dan terbesar di Indonesia, dimana akan menghubungkan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Terminal Terpadu Bus Way Transjakarta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Sehingga berimbas terhadap besarnya keinginan masyarakat untuk tetap menggunakan jasa bandara Halim Perdanakusuma sebagai tempat mereka melakukan perjalanan khususnya

melalui jalur udara. Oleh karenanya Lanud Halim akan menjadi sangat padat apabila menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas Lanud Halim Perdanakusuma.

Dalam perspektif pertahanan udara, IKN Penajam Paser Utara dalam jangka 10 tahun ke depan kemungkinan masih belum siap menghadapi perang udara terbuka mengingat sangat dekat dengan arena pertempuran global jika belum dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang setara dengan apa yang dimiliki oleh ibu kota Jakarta. Hal utama yang perlu diwaspadai dalam pertahanan ibu kota negara adalah ruang udara. Alasannya adalah karena ruang udara begitu terbuka tanpa ada kendala-kendala fisik dan sistem pertahanan yang memadai sangat mudah dikuasai oleh musuh. Kekuatan udara yang efektif merupakan gabungan dari sejumlah elemen yang berbeda. Peran serta masing-masing elemen tersebut bervariasi, tetapi semuanya menjadi sangat penting bagi matra udara.

6. REFERENSI

- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). FRAMING PROCESSES AND SOCIAL MOVEMENTS: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26(1974), 611-639.
- Creswell, J. W. (2014). Research and Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In V. Knight (Ed.), *SAGE Publication Inc.* (Fourth).
- Harmon, B. A., Goran, W. D., & Harmon, R. S. (2014). Military Installations and Cities in the Twenty-First Century: Towards Sustainable Military Installations and Adaptable Cities. *ResearchGate*, October, 21-47. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7161-1_2
- Kemhan_RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015* (K. Pertahanan (ed.)). Kementerian Pertahanan.
- Kosekhanudnas_I, P. (2022). *Kosek IKN Latihan Perkasa "A" Tahun 2022*. Tni-Au.Mil.Id. <https://tni-au.mil.id/kosek-ikn-latihan-perkasa-a-tahun-2022/>
- Maulana, R. (2022). *Rentan Serangan Udara, Gubernur Lemhannas Ingatkan Perubahan Paradigma Pertahanan di IKN*. Okezone. Com. <https://nasional.okezone.com/read/2022/05/19/337/2596736/rentan-serangan-udara-gubernur-lemhannas-ingatkan-perubahan-paradigma-pertahanan-di-ikn>
- Moons, K. G. M., Royston, P., Vergouwe, Y., Grobbee, D. E., & Altman, D. G. (2009).

- Prognosis and prognostic research: What, why, and how? *BMJ (Online)*, 338(7706), 1317-1320. <https://doi.org/10.1136/bmj.b375>
- Puspen TNI. (2015). *Danlanud Halim Ajak Pengurus Fasida DKI Sosialisasikan Olah Raga Kedirgantaraan*. Tni.Mil.Id. <https://tni.mil.id/view-72794-danlanud-halim-ajak-pengurus-fasida-dki-sosialisasikan-olah-raga-kedirgantaraan.html>
- Putri Nindya, A., Alief Abiyya, R., & Artikel, R. (2022). Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 67-84. <https://doi.org/10.22212/JP.V13I1.2917>
- Ramelan, P. (2015). *Analisis Intelijen Tentang Lanud Halim Perdanakusuma Sebagai Civil Enclave*. Ramalanintelijen.Net. <http://ramalanintelijen.net/2015/10/26/analisis-intelijen-tentang-lanud-halim-perdanakusuma-sebagai-civil-enclave/>
- Ridwan, Y., & D.A.R, D. (2022). Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Halim Perdanakusuma Sebagai Bandara Komersil Dalam Mewujudkan Profesionalisme Awak Pesawat. *Strategi Pertahanan Udara*, 8(1). <https://doi.org/10.33172/JSPU.V8I1.1051>
- Romero, L. (2020). Analyzing the Relocation Process of the Indonesian Capital City. *Pusat Transformasi Kebijakan Publik*, 1. www.transformasi.org,
- Romilham Friski, N. I. (2020). *Penggunaan Bersama Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Sebagai Bandar Udara (Studi Kasus Pada Halim Perdanakusuma)* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191667>
- Steyerberg, E. W., Moons, K. G. M., Van Der Windt, D. A., Hayden, J. A., Perel, P., Schroter, S., Riley, R. D., Hemingway, H., & Altman, D. G. (2013). Guidelines and Guidance Prognosis Research Strategy (PROGRESS) 3: Prognostic Model Research. *PLOS Medicine*, 10(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001381>
- Supriyatno, M. (2013). Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1), 1-23. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373>
- Westenhoff, C. M. (1990). Military Air Power The Cadre Digest of Air Power Opinions and Thoughts. In *Air University Press* (Issue October).